

# **Pengaruh Tayangan Berita Kekerasan Pada Anak Terhadap Citra Lembaga Pendidikan Kota Lamongan (Studi Kasus: Kompas.id)**

Aninda Putri Sarwandari

Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya

\*[anindaputri.21029@mhs.unesa.ac.id](mailto:anindaputri.21029@mhs.unesa.ac.id)

## **Abstract**

*This study aims to determine the effect of violent news shows on children at SMPN 1 Sukodadi, Lamongan on the image of the educational institution. Acts of violence against children in these locations can occur because it started from the presence of 19 students who did not wear ciput or headgear before wearing a veil. A teacher with the initials EWP who saw it was upset and eventually shaved the hair of the 19 students. As a result of this action, student representatives complained about the teacher's actions to his parents who then followed up with the principal. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques by utilizing documentation techniques. Research sources are used through online news, journal articles, and some e-books that are still related to the research theme. The selected online news Media is the channel Kompas.id because this news media is trusted and much in demand by many people. With the news of cases of violence against children at SMPN 1 Sukodadi, Lamongan is considered to affect the image of the educational institution. The image of an educational institution that has been built from the beginning in order to always look positive in the eyes of the public must be destroyed because of the actions of one of the unscrupulous teachers. In following up on this case the principal wants to be responsible for handling the case by reporting the teacher to the Education Office and trying to bring in a psychologist for victims who experience trauma. The results showed that the action taken by a teacher is essentially less appropriate because as a teacher in his philosophy has where digugu and imitated, which digugu means his words must be accounted for and ditisru means attitudes and actions can be an example for students. The action taken by the teacher can damage the image of the educational institution, especially this case until it enters the online news media that can be read by the general public. As a news media, it should also provide factual news so that the general public can draw the right conclusions on cases uploaded in the news media.*

**Keywords:** *Violence Against Children; News Shows; Lamongan City Educational Institutions*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tayangan berita kekerasan pada anak di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan terhadap citra dari lembaga pendidikan tersebut. Tindak kekerasan pada anak di lokasi tersebut dapat terjadi karena berawal dari adanya 19 siswi yang tidak memakai ciput atau penutup kepala sebelum dipakaikan kerudung. Seorang guru dengan inisial EWP yang melihat hal tersebut merasa kesal dan pada akhirnya mencukur paksa rambut dari ke 19 siswi tersebut. Akibat tindakannya ini, perwakilan siswa mengadukan tindakan guru tersebut ke orang tuanya yang kemudian ditindak lanjuti ke kepala sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan teknik dokumentasi. Sumber penelitian yang digunakan melalui berita online, jurnal artikel, dan beberapa *e-book* yang masih berkaitan dengan tema penelitian. Media berita online yang dipilih adalah kanal Kompas.id karena media berita ini terpercaya dan banyak diminati oleh banyak orang. Dengan adanya pemberitaan kasus kekerasan pada anak di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan dinilai dapat memengaruhi citra dari lembaga pendidikan tersebut. Citra lembaga pendidikan yang telah dibangun sejak awal agar senantiasa terlihat positif dimata masyarakat harus dihancurkan karena tindakan dari salah satu oknum guru. Dalam menindaklanjuti kasus ini kepala sekolah mau bertanggungjawab untuk menangani kasus tersebut dengan melaporkan guru tersebut kepada Dinas Pendidikan dan berusaha mendatangkan psikolog bagi korban yang mengalami trauma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan oleh seorang guru tersebut pada hakikatnya kurang pantas dilakukan karena sebagai seorang guru dalam filosofinya memiliki mana digugu dan ditiru, yang mana digugu artinya perkataannya harus bisa dipertanggungjawabkan dan ditisru artinya sikap serta perbuatannya dapat menjadi teladan bagi

siswa. Aksi yang dilakukan oleh guru tersebut dapat merusak citra lembaga pendidikan apalagi kasus ini sampai masuk kedalam media berita online yang dapat dibaca oleh khalayak umum. Sebagai sebuah media berita sudah seharusnya juga memberikan berita yang factual agar para khalayak umum dapat mengambil kesimpulan yang tepat atas kasus yang diunggah dalam media berita.

**Kata Kunci:** Kekerasan Pada Anak; Acara berita; Lembaga Pendidikan Kota Lamongan

## 1. Pendahuluan

Internet saat ini menjadi media baru yang mampu merubah pola komunikasi kehidupan bermasyarakat. Hadirnya internet di zaman modern ini mampu mempermudah masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang dapat diakses hingga keseluruhan dunia [1]. Internet menjadi bukti bagi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin modern.

Di era globalisasi ini terlihat adanya perbedaan dari segi masyarakat dalam mengakses informasi. Berawal dari surat kabar hingga saat ini berita telah bertebaran di media-media online [2]. Dilansir dari databoks ditunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia tahun 2013 hingga 2023 mengalami kenaikan yang signifikan.



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/> (2023)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa populasi pengguna internet nasional tiap tahun semakin meningkat. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 terlihat adanya peningkatan sebesar 5,44% atau setara 11 juta orang. Pertumbuhan jumlah pengguna internet dalam satu decade terakhir terlihat bahwa pada tahun 2016 cukup tinggi mencapai 50,16% secara tahunan. Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan paling lambat di Januari 2022 yang hanya sebesar 0,5% [3].

Adapun menurut Ward dikutip dari buku Media Online: Pembaca, laba, dan etika disebutkan bahwa kehadiran internet sebagai saluran baru dengan keseluruhan keterlibatannya mampu menciptakan adanya kegawatan baru di ranah etis jurnalistik [4]. Internet ditinjau mampu digunakan sebagai media interaksi komunitas. Media online mampu membuka ruang bagi masyarakat lingkup manapun untuk memberikan dan menyampaikan gagasan serta opininya masing-masing.

Adapun media-media berita online saat ini telah menerapkan adanya 5 tren yang terdiri dari: 1) Penekanan dalam aspek kecepatan, 2) Keaslian dalam pembuatannya, 3) Kecenderungan sensasi menjadi salah satu menu utama di kehidupan sehari-hari, 4) masih bersifat jakartasentris, dan 5) media berita online masih melebih-lebihkan suatu isu yang sedang hangat [2]. Berdasarkan dari kelima tren tersebut diketahui bahwa media online harus ditinjau kelegalannya apakah media tersebut bisa dikatakan legal atau malah masih bersifat provokatif dan sensasional. Sehingga dalam hal ini, penikmat media-media berita online dituntut harus bisa kritis dan bijaksana dalam menyaring berita-berita yang beredar di media online.

Kekerasan seringkali terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, hingga Surabaya. Namun demikian, kasus kekerasan bisa saja terjadi dimana saja dan dapat menimpa siapa saja salah satunya pada anak. Sebagai contoh kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Lamongan belakangan ramai diperbincangkan karena menyangkut dengan salah satu lembaga pendidikan yang ada di kota tersebut. Lembaga pendidikan pada hakikatnya harus menjadi tempat anak didik untuk belajar bergaul, baik dengan sesamanya, dengan guru, dan seluruh warga sekolah. Selain itu, lembaga pendidikan menjadi tempat bagi anak didik untuk belajar menaati peraturan dan mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara.

Namun pada contoh kasus yang baru-baru ini sedang terjadi adalah adanya kasus cukur paksa siswi di salah satu lembaga pendidikan di kota Lamongan. Berdasarkan contoh kasus tersebut kemudian tidak dapat menutup fakta bahwa di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan [5]. Kasus ini dapat terjadi karena berawal dari tindakan seorang guru berinisial RR EWP mencukur paksa rambut dari 19 siswi kelas IX SMPN 1 Sukodadi, Lamongan. Tindakan tersebut didasari oleh karena adanya belasan siswi yang tidak memakai ciput atau bagian dalam kerudung sehingga rambutnya kelihatan. Karena alasan tersebutlah yang membuat sang guru geram dan langsung mencukur rambut dari belasan siswi tersebut. Pada akhirnya para siswi melaporkan tindakan ini kepada kepala sekolah untuk menuntut pertanggungjawaban guru berinisial RR EWP tersebut sebagai bentuk kekerasan pada anak.

Untuk memperkuat analisis dari penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Naufal Perdana Astiyan Putra dan Martinus Legowo (2023) dalam penelitiannya berjudul Analisis Kasus Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Kasus Penganayaan Guru Terhadap Siswa di Jogoroto-Jombang). Dalam penelitian ditemui hasil berupa kekerasan dalam pendidikan seringkali ditemukan di Indonesia, lebih khusus adalah kasus kekerasan yang melibatkan tenaga pendidik dengan peserta didik. Hakikat guru dengan siswa adalah dengan adanya hubungan komunikasi timbal balik yang berlangsung secara independent, tanpa adanya tekanan dari kedua belah pihak [5].

Berdasar dari contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat dari sebuah lembaga pendidikan yang seharusnya mendidik namun disalahgunakan oleh beberapa oknum tertentu. Peneliti dalam tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pemberitaan kasus kekerasan pada anak terhadap citra yang akan diterima oleh lembaga pendidikan di Lamongan. Sehingga diharapkan dengan penelitian ini mampu

memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Yusuf bertujuan untuk mencari pemaknaan dan pemahaman tentang suatu fenomena ataupun kejadian yang ada di kehidupan manusia dengan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kajian yang diteliti secara kontekstual dan menyeluruh [6]. Sedangkan sifat deskriptif memiliki artian sebagai pencarian tentang situasi, kegiatan, maupun fenomena tertentu yang dikaji secara mendetail dan tepat. Sehingga data yang diperoleh nantinya akan dijelaskan secara terperinci dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi. Dalam sebuah penelitian kualitatif, dokumen menjadi suatu hal yang penting dan sumber informasi yang sangat berguna. Sehingga dalam penelitian ini teknik dokumentasi dapat ditunjukkan dengan cara membaca berita dan isu terkait tentang kasus Pencukuran paksa siswi oleh seorang Guru di SMPN Sukodadi Lamongan. Berita terkait kasus tersebut dikumpulkan melalui media berita online Kompas.id yang kemudian berita tersebut diunduh untuk dapat diteliti lebih lanjut. Pemilihan media berita online Kompas.id didasari karena pada situs Databoks disebutkan bahwa media onlie tersebut menjadi salah satu media berita yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya masyarakat akan lebih mempercayai berita yang dituangkan dalam situs Kompas.id. Penelitian dilakukan dengan menggunakan perspektif teori fakta sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim.

Fakta sosial merupakan sesuatu yang berada di luar individu dan bersifat makro sehingga memberikan penekanan pada aspek tatanan masyarakat secara lebih luas. Durkheim sendiri dalam perspektifnya membagi fakta sosial menjadi dua macam, yaitu fakta sosial material dan non material. Dimana fakta sosial material lebih merujuk pada kajian seputar masalah hukum dan birokrasi, sedangkan non material lebih pada kebudayaan dan pranata sosial. Sehingga kemudian dalam penelitian ini perspektif fakta sosial Emile Durkheim memandang anak sebagai individu yang lemah dan selalu diposisikan terbawah dalam masyarakat atau tergolong dalam jenis fakta sosial non material.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Tindak pidana kekerasan belakangan ini sering ditemui dalam dunia pendidikan. Fenomena ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti misalnya kekerasan dalam pendidikan muncul karena adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik [7]. Pelanggaran terjadi karena adanya pihak yang melanggar dan yang memberikan sanksi. Apabila sanksi yang diberikan telah melebihi batas dan tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Sebagai contoh adalah tindakan seorang guru di SMPN Sukodadi Lamongan yang terindikasi sebagai tindak kekerasan pada anak. Tindakan ini diawali oleh adanya guru berinisial RR EWP yang dilaporkan ke kepala sekolah karena diduga telah melakukan tindakan mencukur paksa rambut 19 siswi di sekolah tersebut. Aksi tersebut berhasil diketahui oleh kepala sekolah karena kalangan siswi mengadukannya ke orang tua mereka dan keluarga kemudian mempermasalahkan hal ini. Kejadian bermula ketika seorang guru berinisial EWP selaku guru pengampu mata pelajaran melihat sejumlah siswi yang tidak memakai ciput atau bagian dalam kerudung yang digunakan untuk menutupi rambut sebelum memakai kerudung. Melihat hal tersebut kemudian EWP menjadi kesal dan kemudian bertindak di luar kewenangannya. Kejadian ini ditinjau dapat menimbulkan trauma bagi siswi yang terkena tindakan cukur paksa. Dari tindak kekerasan ini selanjutnya diadakan pertemuan antara orangtua dengan sekolah untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi. Berdasarkan dari sumber berita kompas.id

disebutkan bahwa masalah tersebut sebenarnya sudah dapat diselesaikan secara damai karena tidak adanya orang tua yang menempuh jalur hukum [8]. Meskipun demikian, Harto selaku Kepala SMPN 1 Sukodadi memberikan pertanggungjawaban dengan mendatangkan psikolog untuk membantu penanganan trauma bagi para siswi yang terkena cukur paksa. Selain itu, kepala SMPN 1 Sukodadi ini juga telah melaporkan tindakan EWP ke Dinas Pendidikan untuk diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut. Saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA).

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, dapat dijelaskan lebih dulu mengenai kekerasan. Kekerasan dapat menjadi sebuah aktivitas individu dan kelompok atau sering disebut sebagai kekerasan individu dan kolektif. Kekerasan mengilustrasikan tentang sifat dari aturan sosial, pelanggaran aturan, hingga reaksi sosial pada pelanggaran aturan yang kompleks dan bertentangan [7]. Kekerasan dalam pendidikan dapat didefinisikan sebagai sikap agresif pelaku yang melewati batas kewenangan sehingga menimbulkan pelanggaran hal bagi korban. Dalam sebuah lembaga pendidikan, kekerasan seringkali ditemui karena kondisi tertentu yang melatarbelakanginya. Kondisi tertentu ini dapat muncul sewaktu-waktu, oleh siapa saja dalam lembaga pendidikan. Kemudian ada pula kekerasan yang diartikan oleh Giroux, dimana kekerasan yang dilakukan oleh kelompok dominan kepada kelompok subordinat. Jenis kekerasan ini terjadi karena adanya dominasi dan juga ketimpangan antara penguasa (Guru) dengan masyarakat (Murid) yang dapat menghilangkan harkat manusia. Kekerasan yang kedua adalah kekerasan terselubung. Dimana kekerasan ini dimanifestasikan melalui standardisasi kurikulum kepada guru dan murid [9]. Artinya kekerasan jenis ini dioperasionalkan melalui kurikulum pembelajaran di dalam kelas.

Dari gambaran kasus yang dilakukan oleh seorang guru berinisial EWP kepada 19 muridnya termasuk pada kekerasan yang diakibatkan oleh adanya ketimpangan antar kelompok dominan dengan kelompok subordinat. Tindakan yang dilakukan oleh EWP tersebut tidak mencerminkan perilaku yang sepatutnya sebagai seorang tenaga pendidik [5]. Aksi pembotakan rambut kepada 19 siswi ini tergolong pada kekerasan secara fisik yang dimana kemudian kondisi psikis dari siswi-siswi tersebut harus diperhatikan karena timbulnya trauma mendalam. Sebagai seorang guru, EWP seharusnya dapat lebih memilah dan memperhatikan psikis siswa dengan tidak memberikan hukuman yang melebihi batas wewenang dan mengganggu kondisi mental serta psikis dari beberapa siswa tersebut. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa kepada anak-anak termasuk dalam bentuk perilaku yang menyimpang, dimana kemudian akan menciptakan balasan (ganjaran) yang negative bagi pelaku tindak kekerasan. Seseorang yang melakukan tindak kekerasan akan merugikan mereka yang menjadi korbannya. Dalam kasus pencukuran paksa oleh EWP terhadap 19 muridnya merupakan salah satu bentuk kekuasaan orang dewasa terhadap anak dengan tujuan agar anak merasa takut dan tunduk pada aturan yang dibuat oleh orang dewasa [7]. Artinya kekerasan dalam kasus ini dijadikan sebagai alat disiplin maupun penghukuman di sebuah lembaga formal pendidikan.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan ini kemudian menuai banyak kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Mulai dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Dinas Pendidikan sangat memperhatikan kasus ini. Bersumber dari kompas.id Nahe'i, selaku komisioner Komnas Perempuan mengatakan bahwa "Tindakan tersebut adalah bentuk diskriminasi dan kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan. Tindakan itu mencoreng nama baik pendidik dan institusi pendidikan karena bertentangan dengan prinsip dan tujuan pendidikan," [10]. Selanjutnya menurut Komnas Perempuan pula, tindakan pencukuran rambut ini disebabkan oleh adanya kebijakan daerah yang diskriminatif tentang kewajiban berbusana sesuai dengan symbol agama yang sesuai dengan pemahaman tertentu dan diterjemahkan

dalam lembaga pendidikan. Dalam menyikapi hal aksi tersebut, Komnas Perempuan mendorong pemerintah, pemerintah daerah, hingga dinas pendidikan setempat untuk mencabut kebijakan yang cenderung diskriminatif, salah satunya kewajiban untuk mengenakan atribut keagamaan tertentu. Hal tersebut dilakukan agar lembaga pendidikan dapat menjadi ruang yang ramah dan bebas kekerasan.

Dari adanya kasus yang menimpa 19 siswi di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan ini kemudian mengakibatkan menurunnya citra lembaga formal pendidikan tersebut. Sehingga pada hakikatnya tindakan negative yang dilakukan oleh si pelaku akan merugikan berbagai belah pihak khususnya korban dan juga instansi pendidikan terkait. Adanya pemberitaan tentang aksi yang dilakukan oleh oknum guru terhadap muridnya tersebut dapat berpengaruh pada citra yang dimiliki oleh instansi pendidikan. Terlebih dahulu dapat dijelaskan bahwa citra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda: gambar, rupa, gambaran. Dalam artian gambaran yang dimiliki oleh tiap orang mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, maupun produk. Citra selanjutnya juga dapat diartikan sebagai bagaimana satu pihak memandang sebuah instansi (lembaga) atau suatu aktivitas. Menurut Frank Jeffkins dalam bukunya berjudul *Public Relations Technique* menyebutkan bahwa citra adalah kesan seseorang tentang suatu hal yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalaman [11]. Terbentuknya citra yang baik dari suatu lembaga pendidikan menjadi asset yang sangat penting karena memiliki pengaruh penting terhadap persepsi publik dan operasi organisasi dalam berbagai hal. Citra dari suatu lembaga pendidikan dapat dilihat melalui identitas lembaga yang tercermin dari pemimpinnya, nama lembaga, hingga tampilan lainnya yang memanfaatkan media publisitas dari visual, audio, ataupun audio visual. Citra dari suatu lembaga pendidikan juga dapat berbentuk non fisik seperti nilai-nilai serta filosofis yang dibangun, pelayanan, gaya kerja, hingga komunikasi internal dan eksternal.

Apabila dikaitkan dengan kasus pencukuran paksa oleh seorang guru kepada 19 siswinya di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan yang diberitakan pada berita online Kompas.id, citra negative dari lembaga pendidikan tersebut mulai bermunculan dari berbagai pihak. Tindakan ini sangat disayangkan karena citra yang telah dibentuk oleh lembaga pendidikan tersebut selama ini harus dirusak karena hasil perbuatan tidak pantas yang dilakukan oleh seorang guru. Dalam pemberitaan Kompas.id yang berjudul “Cukur Paksa Siswi di Lamongan Bentuk Kekerasan pada Anak” dijelaskan latar belakang terjadinya aksi pencukuran yang dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya dipaparkan pula bahwa terdapat beberapa lembaga yang mengecam aksi ini karena tindakan tersebut dapat mencoreng nama baik pendidik dan institusi pendidikan karena bertentangan dengan prinsip serta tujuan pendidikan. Atas peristiwa ini, Komnas Perempuan akhirnya menuntut pemeriksaan secara menyeluruh atas tindak kekerasan itu dengan memastikan adanya pertanggungjawaban dari pelaku maupun institusi pendidikan terkait. Adapun pada media berita yang sama dengan judul “Guru Mencukur Paksa Siswi Indikasi Pendidikan dengan Kekerasan” juga ditonjolkan akibat-akibat negative yang diterima oleh korban. Hal ini ditunjukkan pada kalimat *Tindakan guru ini mengindikasikan pendidikan masih diberikan dengan kekerasan yang meninggalkan trauma sekaligus bertentangan dengan semangat merdeka belajar* [8]. Dimana kalimat tersebut dapat menciptakan kesimpulan lain dari tiap tiap lapisan masyarakat. Mengatasi hal tersebut kemudian diperlukan adanya strategi baru untuk membangun citra lembaga formal pendidikan terkait. Strategi diambil dari bahasa Yunani “strategos” yang terdiri dari kata stratos yang berarti memimpin. Selain itu, strategi juga didefinisikan sebagai penempatan misi sebuah lembaga untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan serta sasaran utamanya dapat tercapai dengan baik. Dalam sebuah lembaga pendidikan, strategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sehingga dengan adanya sebuah strategi, sebuah lembaga akan dapat memperoleh kedudukan atau posisi yang kuat dalam wilayahnya. Penentuan strategi membutuhkan tingkatan komitmen dari sebuah lembaga, dimana

lembaga ini bertanggungjawab untuk memajukan strategi yang mengacu pada hasil akhir. Strategi dan perencanaan untuk masa depan sangat dibutuhkan. Untuk itu, strategi dan perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan, baik perencanaan jangka pendek, sedang, atau panjang, harus benar-benar dilaksanakan agar setiap kegiatan dapat terukur, teramati, dan terevaluasi secara baik. Proses perencanaan dan strategi merupakan cara rasional dalam memandang apa yang dilakukan dan bagaimana mengetahui apa yang harus dilakukan, yang dapat mendukung rasional dan pengambilan keputusan.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, diperlukan adanya langkah-langkah atau strategi untuk membangun sebuah citra. Dikaitkan dengan kasus pencukuran 19 siswi oleh seorang guru yang terjadi di SMPN 1 Sukodadi, citra negative telah didapati oleh sekolah tersebut. Pada sebuah pemberitaan tentang kasus ini juga telah disebutkan adanya langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada para korban. Kepala sekolah mengambil langkah untuk mempertemukan kedua belah pihak antara pelaku (guru pengajar) berinisial EWP dengan para orang tua korban pencukuran paksa. Selain itu, kepala sekolah juga mengambil langkah berupa membuat laporan kepada dinas pendidikan terkait atas kasus yang dilakukan oleh sang guru kepada muridnya. Tindakan ini disebut sebagai tindakan yang tepat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin dapat menempatkan dirinya secara adil dan tidak memihak salah satu pihak, lebih khusus pada pihak guru. Kemudian, sebagai bentuk pertanggung jawaban lain, kepala SMP Negeri 1 Sukodadi, Harto juga meminta kedatangan psikolog untuk menangani trauma dari para siswi yang terkena tindakan cukur paksa. Tindakan cukur paksa oleh guru ini juga disayangkan oleh sang kepala sekolah dengan dibuktikan pada kalimat "*(Cukur paksa) Itu tindakan salah. Kami sudah laporkan ke dinas dan guru itu telah ditarik untuk pembinaan,*" kata Harto [8].

Walaupun telah dilakukannya langkah-langkah strategis untuk memperbaiki citra dari lembaga pendidikan terkait, tidak menutup fakta masih adanya berbagai kecaman yang diterima oleh SMP Negeri 1 Sukodadi, Lamongan. Sebagai contoh dalam media berita disebutkan adanya ungkapan dari dosen keguruan dan pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Holy Ichda Wahyuni, menyebutkan bahwa hukuman cukur paksa termasuk pada hukuman yang berlebihan dari seorang guru kepada muridnya. Padahal diketahui pemakaian ciput bukan menjadi peraturan tertulis yang ada pada lembaga tersebut. Tindakan pencukuran pada 19 siswi ini menunjukkan adanya arogansi berupa pengajaran yang diberikan melalui kekerasan [8]. Pendidikan sejatinya harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan bagi para peserta didik. Pendidikan dapat mencerdaskan anak bangsa dan juga membangun keterampilan dan karakter yang baik dengan cara simpatik dan humanis. Sebagai seorang guru pada hakikatnya harus menjadi sosok yang dapat digugu dan ditiru. Digugu artinya perkataan yang dilontarkan oleh guru harus bisa dipertanggung jawabkan. Adapun ditiru berarti bahwa setiap sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh guru harus menjadi teladan bagi siswa-siswinya. Sebagai seorang guru hendaknya bisa memberlakukan tindakan lain yang tidak menyatukan unsur kekerasan. Sebagai contoh guru bisa dengan mudah memanggil siswa siswinya yang cara berpakaianya kurang rapi atau tidak sesuai dengan berdiskusi. Tentu saja hal ini akan berjalan dengan lancar apabila dari kedua belah pihak mau untuk berkolaborasi dan simpatik dengan satu sama lain.

#### **4. Kesimpulan**

Kekerasan dapat menjadi aktivitas individu dan kelompok; ini sering disebut sebagai kekerasan individu dan kolektif. Kekerasan dalam pendidikan dapat didefinisikan sebagai sikap agresif pelaku yang melewati batas kewenangan sehingga melakukan pelanggaran terhadap hal

yang dimaksudkan untuk korban. Kekerasan dalam lembaga pendidikan sering terjadi karena situasi tertentu yang melatarbelakanginya. Dalam kasus ini, pencukuran paksa EWP terhadap 19 siswanya merupakan jenis kekuasaan orang dewasa terhadap anak dengan tujuan membuat mereka takut dan tunduk pada aturan yang dibuat oleh orang dewasa. Semuanya bermula ketika seorang guru berinisial EWP, yang bertugas sebagai guru pengampu mata pelajaran, melihat beberapa siswa memakai kerudung tanpa ciput atau bagian dalam kerudung yang digunakan untuk menutupi rambut. Setelah melihat hal itu, EWP menjadi marah dan bertindak di luar kewenangannya. Kejadian yang ditinjau ini dapat menyebabkan trauma bagi siswa yang diukur secara paksa. Setelah kasus yang menimpa 19 siswi di SMPN 1 Sukodadi, Lamongan, reputasi sekolah formal menjadi buruk. Pada kenyataannya, tindakan negatif yang dilakukan oleh pelaku akan berdampak negatif pada banyak orang, terutamakorban dan institusi pendidikan terkait. Reputasi institusi pendidikan dapat dipengaruhi oleh pemberitaan tentang tindakan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya.

Strategi yang tepat diperlukan untuk meningkatkan reputasi institusi pendidikan agar dapat beroperasi sesuai dengan tujuan. Strategi lembaga pendidikan didefinisikan sebagai perencanaan yang mencakup serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan akademik tertentu. Dengan adanya strategi, sebuah organisasi dapat memperoleh posisi yang kuat di wilayahnya. Untuk menetapkan strategi, sebuah organisasi harus berkomitmen pada tingkat tertentu, dan organisasi akan bertanggung jawab untuk melanjutkan strategi tersebut, yang akan menghasilkan hasil akhir. Meskipun telah mengambil tindakan strategi untuk meningkatkan reputasi lembaga pendidikan terkait, SMP Negeri 1 Sukodadi, Lamongan masih mendapat banyak kritik. Nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi prioritas utama pendidikan sejati. Pendidikan tidak hanya memiliki kemampuan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menumbuhkan karakter dan keterampilan yang baik. Pada dasarnya, seorang guru harus menjadi individu yang dapat dicontoh dan diikuti. Digugu berarti bahwa guru harus dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang mereka katakan. Ditiru berarti bahwa setiap tindakan dan sikap guru harus menjadi teladan bagi siswa-siswinya. Baik guru maupun murid harus menumbuhkan empati dan rasa terima kasih satu sama lain. Apabila empati ini ditanamkan pada semua orang, lingkungan pendidikan akan menjadi tempat yang menyenangkan dan aman.

## Daftar Pustaka

- [1] D. Waluyo dan S. Maida, “PRAKTIK JURNALISME ERA DIGITAL,” dalam *Media, Komunikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi*, C. Takariani, D. Praditya, dan L. Puspitasari, Ed., Bandung: HALIMA, 2020, hlm. 85–91.
- [2] K. Astria, A. Nuzuli, dan F. Handayani, “Etika Jurnalistik, Perempuan dan Pemberitaan Pelecehan Seksual di Media Online,” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, vol. 3, no. 2, hlm. 191–199, Des 2021.
- [3] C. Annur, “Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (2018-2022\*),” Databoks. [Daring]. Tersedia pada: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023#:~:text=Menurut%20laporan%20We%20Are%20Social,orang%20pada%20awal%20tahun%20ini>.
- [4] J. Margianto dan A. Syaefullah, *Media Online: Pembaca, Laba, dan Etika: Problematika Praktik Jurnalisme Online di Indonesia*. Majalah Pusat Dokumentasi ELSAM, 2006.
- [5] N. Putra, “ANALISIS KASUS KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN (STUDI KASUS PENGANAYAAN GURU TERHADAP SISWA DI JOGOROTO-JOMBANG),” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, vol. 25, no. 1, hlm. 102–107, Mar 2023, doi: <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v25i2.4204>.
- [6] A. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA, 2014.
- [7] Y. Saptarini, “Kekerasan dalam lembaga pendidikan formal (studi mengenai kekerasan oleh guru terhadap siswa sekolah dasar di Surakarta),” Thesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009.
- [8] A. Harto Manumoyoso, “Guru Mencukur Paksa Siswi Indikasi Pendidikan dengan Kekerasan,” *Kompas.id*, 30 Agustus 2023. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/30/guru-mencukur-paksa-siswi-indikasi-pendidikan-dengan-kekerasan>
- [9] R. Hidayat, “Perspektif Sosiologi tentang Kurikulum,” *JPNK*, vol. 17, no. 2, hlm. 178–188, Jan 2011, doi: 10.24832/jpnk.v17i2.16.
- [10] S. Hellen Sinombor, “Cukur Paksa Siswi di Lamongan Bentuk Kekerasan pada Anak,” *Kompas.id*, 9 Januari 2023. [Daring]. Tersedia pada: [https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/01/cukur-paksa-siswi-di-lamongan-bentuk-kekerasan-dan-diskriminasi-pada-anak?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/09/01/cukur-paksa-siswi-di-lamongan-bentuk-kekerasan-dan-diskriminasi-pada-anak?status=sukses_login&status_login=login)
- [11] U. Albar, “Citra Lembaga Pendidikan,” *Isnet.or.id*, 13 Juni 2018. [Daring]. Tersedia pada: <https://isnet.or.id/citra-lembaga-pendidikan/>